

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, perpustakaan kini bertransformasi dari ruang baca konvensional menjadi ruang sosial yang memberdayakan. Perubahan tersebut berangkat dari kesadaran bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Melalui penguatan fungsi perpustakaan, masyarakat dapat mengakses ilmu pengetahuan, berjejaring, serta mengembangkan keterampilan hidup yang relevan dengan tantangan zaman.

Salah satu bentuk nyata dari perubahan paradigma tersebut adalah Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini mendorong perpustakaan di berbagai daerah untuk menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat, tempat masyarakat memperoleh kesempatan yang setara dalam belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi diri. Pendekatan berbasis inklusi sosial menjadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat — tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau pendidikan. Melalui perpustakaan, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui kegiatan produktif, pelatihan, dan kolaborasi komunitas.

Program TPBIS telah dijalankan secara nasional sejak tahun 2018 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Di Kota Semarang, program ini mulai diimplementasikan secara aktif pada tahun 2022 dengan dukungan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinarpus) Kota Semarang. Pelaksanaan program dilakukan melalui kemitraan antara Dinarpus dan perpustakaan kelurahan yang menjadi mitra. Setiap kelurahan menunjuk pengelola yang terdiri dari perangkat kelurahan dan perwakilan masyarakat seperti sekretaris kelurahan, karang taruna, dan tokoh lokal. Para pengelola ini berperan sebagai

fasilitator kegiatan literasi, pendamping masyarakat, serta penghubung antara kelurahan dan Dinarpus.

Untuk mendukung implementasi program, Perpustakaan menyalurkan berbagai bantuan kepada Dinarpus Kota Semarang, seperti buku-buku koleksi baru, perangkat komputer, serta fasilitas jaringan *Wi-Fi*. Bantuan ini digunakan untuk memperkuat sarana dan prasarana perpustakaan kelurahan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, di Kelurahan Bandarharjo dan Miroto, fasilitas komputer dan akses internet digunakan untuk pelatihan dasar komputer bagi warga dan kegiatan literasi digital anak-anak sekolah. Sedangkan di Kelurahan Lemponsari dan Pudukpayung, perpustakaan menjadi tempat pelatihan kewirausahaan, pengolahan produk lokal, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Keberhasilan implementasi TPBIS di tingkat kelurahan sangat bergantung pada peran aktif Dinarpus Kota Semarang sebagai penggerak utama program. Dinarpus bertindak sebagai fasilitator, pembimbing, sekaligus pendamping yang memastikan setiap perpustakaan mitra mampu mengadaptasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu bentuk pendampingan yang rutin dilakukan adalah Peer Learning Meeting (PLM), forum antar perpustakaan mitra untuk berbagi praktik baik dan solusi dari tantangan yang dihadapi di lapangan. Melalui forum ini, implementasi TPBIS menjadi lebih partisipatif, karena setiap kelurahan dapat belajar dari pengalaman satu sama lain.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan TPBIS di Kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kegiatan yang diselenggarakan di perpustakaan kelurahan. Misalnya, di Kelurahan Miroto, kegiatan membaca anak, pelatihan UMKM, hingga pembinaan literasi bagi ibu rumah tangga rutin dilakukan dan mendapat sambutan positif. Sementara di Kelurahan Bandarharjo, kegiatan pelatihan digital dan kewirausahaan menjadi daya tarik utama bagi generasi muda. Fakta ini menunjukkan bahwa perpustakaan kini mulai dilihat bukan hanya sebagai tempat peminjaman buku, tetapi sebagai ruang sosial yang hidup dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.

Namun, di balik keberhasilan tersebut, pelaksanaan program juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kelurahan, karena belum semua perpustakaan memiliki pustakawan khusus atau tenaga pengelola yang kompeten. Akibatnya, sebagian kegiatan masih bergantung pada dukungan staf kelurahan atau relawan. Selain itu, promosi literasi digital dan budaya baca di masyarakat masih perlu diperkuat, mengingat banyak warga yang lebih akrab dengan gawai dan media sosial dibandingkan dengan bahan bacaan konvensional. Meski demikian, dengan dukungan pemerintah kota, kolaborasi antar instansi, serta partisipasi aktif masyarakat, program TPBIS di Kota Semarang tetap menunjukkan perkembangan yang signifikan dan menjadi contoh adaptasi kebijakan nasional di tingkat daerah.

Program TPBIS ini juga sejalan dengan misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui empat pilar pembangunan: sosial, ekologis, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan yang baik. TPBIS berkontribusi langsung pada pencapaian beberapa poin utama SDGs, antara lain SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 10 (Mengurangi Kesenjangan), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Tujuan). Melalui kegiatan literasi, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, perpustakaan menjadi katalis pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Program TPBIS di Kota Semarang telah melibatkan berbagai pihak mulai dari Dinarpus sebagai koordinator, pemerintah kelurahan sebagai pelaksana, serta masyarakat sebagai penerima manfaat dan mitra kegiatan. Kolaborasi ini menjadikan implementasi TPBIS sebagai model kerja sama lintas sektor yang kuat antara pemerintah, komunitas, dan lembaga pendidikan. Dinamika pelaksanaannya mencerminkan bagaimana kebijakan nasional dapat diadaptasi sesuai konteks sosial dan budaya lokal.

Berdasarkan dinamika tersebut, menarik untuk menganalisis lebih dalam bagaimana Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang menjalankan perannya dalam mengimplementasikan kebijakan nasional TPBIS. Analisis ini penting

karena dapat memberikan gambaran sejauh mana kebijakan pusat dapat diterjemahkan secara efektif ke tingkat lokal, serta bagaimana Dinarpus beradaptasi dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Semarang. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana efektivitas dan adaptivitas pelaksanaan program TPBIS, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya di tingkat daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Program TPBIS merupakan inisiatif negara dalam memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, perpustakaan daerah di tingkat kota maupun kabupaten memegang peran strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi program ini. Untuk memastikan keberlanjutannya, evaluasi terhadap capaian program secara komprehensif menjadi hal yang krusial. Penelitian ini difokuskan pada analisis peran Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinarpus) dan mitra perpustakaan kelurahan dalam pelaksanaan program TPBIS, serta sejauh mana instansi ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kinerja Dinarpus menggunakan pendekatan ilmiah guna menilai pelaksanaan, tantangan, serta kontribusinya terhadap keberhasilan TPBIS di wilayah binaannya. Maka dapat dirumuskan pertanyaan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dalam mengimplementasikan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) secara efektif dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat di tingkat kelurahan?
2. Sejauh mana peran Dinarpus Kota Semarang mempengaruhi pencapaian keberhasilan dan penerimaan program TPBIS di perpustakaan desa
3. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi TPBIS di tingkat daerah Semarang.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Dinarpus Kota Semarang dalam mengimplementasikan Program TPBIS di tingkat kota. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kontribusi dan peran kunci Dinarpus dalam mendukung efektivitas dan keberlanjutan program TPBIS di wilayah masing-masing.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi program dari perspektif pelaksana daerah, baik secara struktural maupun kultural.
3. Menganalisis pelaksanaan program TPBIS oleh Dinarpus Kota Semarang berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini bermanfaat bagi evaluasi dan perbaikan untuk keberlangsungan program TPBIS secara berkelanjutan.
2. Sebagai referensi ataupun Gambaran riil situasi pelaksanaan program di daerah.

#### **2. Manfaat Teoritis**

1. Menjadi penguatan dan dasar dalam proses evaluasi kebijakan publik.
2. Memperkaya penelitian kebijakan nasional yang dijalankan di daerah.
3. Memberikan masukan bagi semua kalangan untuk peningkatan keberhasilan program.

### **1.5 Luaran**

Tugas akhir ini tidak hanya disusun sebagai syarat akademik untuk menyelesaikan program studi, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan luaran (ouput) berupa publikasi ilmiah dalam bentuk Artikel Jurnal. Luaran tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat akademik,

praktisi dan lembaga terkait yang berkepentingan dalam bidang perpustakaan dan kebijakan publik.

Melalui publikasi ilmiah ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoritis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah implementasi kebijakan publik di bidang perpustakaan. Artikel ilmiah yang dihasilkan akan memuat analisis mengenai pelaksanaan TPBIS oleh Dinarpus Kota Semarang dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier. Luaran ini diharapkan mampu menjadi referensi ilmiah bagi peneliti lain yang tertarik meneliti implementasi kebijakan di bidang literasi, arsip dan perpustakaan, memberikan masukan praktik bagi instansi pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan program TPBIS di tingkat lokal, meningkatkan visibilitas akademik mahasiswa dan institusi dengan menunjukkan bahwa hasil penelitian mahasiswa tidak hanya berhenti pada laporan tugas akhir, tetapi juga di konversi menjadi pengetahuan baru yang bermanfaat secara luas.

Secara teknis, jurnal akan disusun dengan mengacu pada format publikasi ilmiah yang berlaku. Jurnal akan dikirimkan ke jurnal ilmiah yang relevan di bidang perpustakaan, dan ilmu informasi. Dengan demikian, kehadiran luaran ini menunjukkan bahwa tugas akhir ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan akademik semata, tetapi juga berupaya mendiseminasi pengetahuan dan praktik baik implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Semarang kepada publik.